

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT SUKU POLAHI DALAM
PEMENUHAN HAK PEKERJAAN DAN KEPENDUDUKAN**

Disusun dan Diajukan oleh :


KARINA NATAYA WALENTA

NIM. 710519023

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH
NIP. 19760208 2003122002


Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH
NIP. 19810306 2008122001

Gorontalo, Januari 2022

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Hukum
Universitas Negeri Gorontalo


Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
NIP: 197412232003122011

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT SUKU POLAHI DALAM
PEMENUHAN HAK PEKERJAAN DAN KEPENDUDUKAN**

Disusun dan Diajukan oleh :

KARINA NATAYA WALENTA

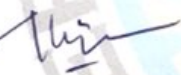
NIM : 710519023

Disetujui Dan Diajukan Panitia Ujian Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada
Program Studi Ilmu Hukum

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH
NIP. 197602082003122002



Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH
NIP. 198103062008122001


Gorontalo, Januari 2021

Mengetahui :

**Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Gorontalo**

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**


Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si
NIP. 195912271986032003


Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH
NIP. 197412232003122011

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT SUKU POLAHI DALAM
PEMENUHAN HAK PEKERJAAN DAN KEPENDUDUKAN**

Oleh :

KARINA NATAYA WALENTA

NIM : 710519023

Telah Disetujui dan Disahkan Panitia Seminar Tesis
pada Tanggal Januari 2021

Dewan Penguji

1. **Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH** (.....)
NIP. 197602082003122002
2. **Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH** (.....)
NIP. 198103062008122001
3. **Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum** (.....)
NIP. 196804091993032001
4. **Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H., MH** (.....)
NIP. 197412232003122011

Mengetahui :

**Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Gorontalo**

Prof. Dr. Asha Aneta, M.Si
NIP. 195912271986032003

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
NIP. 197412232003122011

ABSTRAK

Karina Nataya Walenta, NIM: 710519023, Perlindungan Hukum Masyarakat Suku Polahi Dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Dan Kependudukan. Dibimbing oleh Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., MH sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Lusiana M. Tijow, SH., MH sebagai Pembimbing Kedua.

Penelitian ini bertujuan menganalisis Perlindungan Hukum Masyarakat Suku Polahi Dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan dan Kependudukan, baik dalam upah pekerja, hak mendapatkan dokumen sipil negara, dan pelayanan pendidikan serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak pekerjaan dan kependudukan bagi masyarakat Suku Polahi.

Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan sumber bahan hukum primer berasal dari data lapangan hasil wawancara ditunjang dengan data sekunder perundang-undangan, asas hukum, buku hukum, jurnal yang relevan dengan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan lapangan, perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis secara kualitatif, proses penalaran untuk menarik simpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Masyarakat Suku Polahi dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan dan Kependudukan khususnya pada masyarakat Suku Polahi di Desa Tamaila Utara masih terdapat problematika yang cukup krusial terkait dengan upah dan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga sejatinya dibutuhkan sebuah peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota atau peraturan turunannya yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat Suku Polahi agar ketika bekerja mereka mendapatkan hak-haknya secara seimbang dan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Adapun pemenuhan hak kependudukan masyarakat Suku Polahi Dusun Tumba Tamaila Utara (hak pencatatan perkawinan dan hak mendapatkan pendidikan) belum sepenuhnya terlaksanakan sehingga berdampak pada ketiadaan kehadiran dokumen sipil negara terkait perkawinan masyarakat suku Polahi dan berimplikasi terhadap status hukum anak dan penerimaan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat Suku Polahi. Faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pemenuhan hak pekerjaan dan kependudukan bagi masyarakat Suku Polahi setidaknya terdapat dua faktor utama yaitu, faktor bentuk perilaku komunikasi dan faktor regulasi yang belum mengakomodir kesejahteraan suku polahi. Sebagai solusi dalam permasalahan ini, maka akan berfokus pada tanggungjawab pemerintah terhadap hak masyarakat adat dapat dilaksanakan dengan cara memberikan penanganan sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat, Pemenuhan Hak

ABSTRACT

Karina Nataya Walenta, Student ID Number 710519023. **Legal Protection of Polahi Tribe Community in Fulfilling Occupational and Population Rights.** The Principal Supervisor is Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., M.H., and the Co-supervisor is Dr. Lusiana M. Tijow, S.H., M.H.

This study aims to analyze the legal protection of the Polahi Tribe community in fulfilling occupational and population rights, both in terms of wages for workers, the right to obtain state civil documents, and educational services, as well as analyzing the hindering factors in fulfilling the occupational and population rights for the Polahi Tribe community.

This is an empirical legal study with primary legal sources derived from field data from interview supported by secondary data in the form of legislation, legal principles, legal books, journals that are relevant to the study. This study applies field approach, statute approach, and case approach. The data are analyzed qualitatively with a reasoning process using deductive thinking methods, which explain things from general to specific.

The findings indicate that in the legal protection of the Polahi Tribe community in fulfilling occupational and population rights, especially the Polahi Tribe community in Tamaila Utara Village, there are still quite crucial problems related to wages and welfare for the community. Therefore, it is urgently needed a provincial/district/city regulation or its derivative regulations that can accommodate the interests of the Polahi Tribe community so that they are able to get their rights equally when they work. The fulfillment of the population rights of the Polahi Tribe in Tumba, Tamaila Utara (the right to register marriage and the right to receive education) has not been fully implemented so that it has an impact on the absence of state civil documents related to marriage. This then has implications for the legal status of children and the acceptance of various public services for the Polahi Tribe community. The hindering factors of the fulfillment of occupational and population rights for the Polahi Tribe community are communication factors and regulatory factors that have not accommodated the welfare of the Polahi Tribe. As a solution to this problem, it tends to be concerned about the government's responsibility for the rights of this indigenous community, which can be carried out by providing handling in accordance with the needs of these indigenous community.

Keywords: Legal Protection, Indigenous Community, Fulfillment of Rights

